

## BAB III

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan Tugas Pembantuan yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada instansi yang memberikan penugasan. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga kepada Kepala Daerah atas APBN yang digunakan untuk kegiatan Tugas Pembantuan.

Tujuan pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN serta program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi misinya. Adapun informasi capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah penerima Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 yaitu :

- a. Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
- b. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga;
- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.



Instansi yang memberikan Tugas Pembantuan adalah :

- a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
  - b. Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
  - d. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
  - e. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - f. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
- a. Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga
    - 1) Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
      - a) Dasar Hukum  
Nomor : SP DIPA- 018.04.4.039152/2021 tanggal 23 November 2020.
      - b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
      - c) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan  
Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.
      - d) Pelaksanaan Program dan Kegiatan  
Bantuan sarana berupa :
        - Pengembangan kawasan padi in hibrida seluas 2.703 ha, berupa bantuan benih padi varietas in pari 32 sejumlah 67.575 kg (25 kg/ha) yang terbagi dalam 154 kelompok tani berlokasi di Kecamatan Kaligondang 190 ha, Padamara 543 ha, Kutasari 95 ha, Bojongsari 280 ha, Bobotsari 295 ha, Karangreja 30 ha, Kertanegara 595 ha dan Karangmoncol 675 ha;
        - Pengembangan kawasan jagung seluas 680 ha terbagi dalam 54 kelompok tani, berupa bantuan benih jagung hibrida 10.200 kg (15 kg/ha) varietas bisi 226, bisi 228 dan pioneer 35, berlokasi di Kecamatan Padamara 20 ha, Kutasari 340 ha, Bojongsari 140 ha, dan Kertanegara 180 ha;
        - Pengembangan kawasan jagung tumpangsari seluas 113 ha terbagi dalam 8 kelompok tani, varietas bisi 77 dan bisi 226, berlokasi di Kecamatan Pengadegan 75 ha, Kecamatan Karangreja 33 ha dan Kecamatan Kemangkon 5 ha;



- Perbenihan kedelai varietas detam seluas 25 ha untuk 1 kelompok tani berlokasi di Kecamatan Kemangkon;
- Pengembangan kawasan kedelai seluas 386 ha, berupa bantuan benih sejumlah 19.300 kg (50 kg/ha), NPK non subsidi 19.300 kg (50 kg/ha), pestisida 772 liter (2 liter/ha), pupuk hayati 1.544 liter (4 liter/ha), dan rhizobium 97 kg (0,25 kg/ha) yang berlokasi di Kecamatan Kemangkon 237 ha, Kecamatan Pengadegan 75 ha, Kecamatan Kalimanah 11 ha, Kecamatan Padamara 6 ha, Kecamatan Karangreja 33 ha, Kecamatan Karanganyar 7 ha dan Kecamatan Rembang 17 ha;
- Pengembangan kawasan kacang hijau seluas 100 ha, berupa bantuan benih 2.500 kg (25 kg/ha), NPK non subsidi 2.500 kg (50 kg/ha) berlokasi di Kecamatan Kemangkon 50 ha dan Kecamatan Mrebet 50 ha.

Bantuan prasarana berupa :

- Pembangunan UPH Jagung senilai Rp.125.000.000,- untuk pembuatan nasi jagung instan diberikan kepada Kelompok Wanita Tani Sri Lestari Desa Nangkod Kecamatan Kejobong;
- Pembangunan UPH Kedelai senilai Rp. 125.000.000,- untuk pembuatan kripik tempe diberikan kepada Kelompok Tani Krida Tani Desa Klapasawit Kecamatan Kalimanah;
- Pembangunan UPPO senilai Rp.200.000.000,- diberikan kepada Kelompok Tani Setia Kawan Desa Karangpucung Kecamatan Kertanegara;
- Pembangunan UPPO senilai Rp.200.000.000,- diberikan kepada Gapoktan Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara.

e) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran APBN TP Provinsi Tahun 2021.

Jumlah anggaran Rp.3.403.830.000,-.

Realisasi anggaran Rp.3.319.615.025,- (97,53%).

f) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan cukup memadai.

g) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

2) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

a) Dasar Hukum

Nomor : SP DIPA- 018.03.4.039151/2021 tanggal 23 November 2020.

b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan



Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

- c) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.
  - d) Pelaksanaan Program dan Kegiatan  
Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan kawasan jamur seluas 100 m<sup>2</sup> berlokasi di Kelompok Pemuda Tani Muda Lestari Desa Gondang Kecamatan Karangreja berupa bantuan kumbung jamur seluas 100 m<sup>2</sup>. Kawasan durian seluas 30 ha berlokasi di Poktan Sumber Jaya II Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan dan Poktan Sumber Mulya Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan dan Gapoktan Sida Muncul Desa Slinga Kecamatan Kaligondang. Kawasan Tanaman Obat (kapulaga) seluas 5 ha berlokasi di Kelompok Tunas Karya Desa Gondang Kecamatan Karangreja.
  - e) Sumber dan Jumlah Anggaran  
Sumber anggaran APBN Tahun 2021.  
Jumlah anggaran Rp.330.875.000,-.  
Realisasi anggaran Rp.313.375.000,- (94,71%).
  - f) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan  
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan cukup memadai berupa bantuan kumbung rangka baja ringan, dinding paranet, atap dari galvalum, lantai tanah, dilengkapi dengan rak kumbung jamur dari baja ringan.
  - g) Permasalahan dan Solusi  
Permasalahan seperti pada jenis sayuran lainnya (cabai, sawi, tomat, kobis, dan lain-lain) karena adanya pandemi Covid-19, penjualan jamur agak tersendat, daya beli masyarakat menurun sehingga pendapatan petani menurun.
- 3) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian
- a) Dasar Hukum  
DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor SP-DIPA 018.03.4.039151/2021 Tanggal 5 Desember 2019.
  - b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
  - c) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan



Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.

d) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan 2 (dua) embung pertanian berlokasi di Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol dan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon, rehabilitasi jaringan irigasi tersier sejumlah 22 paket, berlokasi di Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara, Desa Kragean Kertanegara, Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar, Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar, Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang, Desa Makam Kecamatan Rembang, Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu, Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu, Desa Danasari Kecamatan Karangjambu, Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja, Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja, Desa Karangtalun Kecamatan Bobotsari, Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari, Desa Karangaren Kecamatan Kutasari, Desa Kutasari Kecamatan Kutasari, Desa Prigi Kecamatan Padamara, Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Desa Penolih Kecamatan Kaligondang, Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang dan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang. Pemberian bantuan *power thresher* 5 unit, *corn sheller* 5 unit, fasilitasi pupuk dan pestisida 1 paket, fasilitasi pembiayaan pertanian 1 paket dan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

e) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran APBN Tahun 2021.  
Jumlah anggaran Rp.2.134.693.000,-.  
Realisasi anggaran Rp.2.134.413.000,- (99,99%).

f) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan cukup memadai.

g) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

4) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (UPLAND)

a) Dasar Hukum

DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor DIPA-018.08.4.039160/2021 Tanggal 23 November 2020.

b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.



- c) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.
- d) Pelaksanaan Program dan Kegiatan  
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (UPLAND). Kegiatan UPLAND adalah kegiatan integrasi kambing dan lada yang berlokasi di 9 Desa di Kecamatan Pengadegan dan 11 Desa di Kecamatan Kejobong. Penerima kegiatan ini adalah 32 kelompok tani yang terdiri dari 12 kelompok tani di Kecamatan Pengadegan dan 20 kelompok tani di Kecamatan Kejobong. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada kegiatan ini ditujukan untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan UPLAND di Kabupaten Purbalingga. Komponen yang dibebankan antara lain honorarium Koordinator Fasilitator Desa sejumlah 1 orang, honorarium Fasilitator Desa sejumlah 22 orang, honorarium Petugas *On-Granting Office* (OGO) sejumlah 2 orang, bantuan transpor Koordinator Fasilitator Desa sejumlah 1 orang, bantuan transpor Fasilitator Desa sejumlah 22 orang, bantuan transpor Penyuluh Pertanian Pendamping Kegiatan sejumlah 16 orang, dan belanja elektronik berupa 3 unit laptop, 1 unit harddisk 2T, 2 unit printer, serta 1 unit *scanner*.
- e) Sumber dan Jumlah Anggaran  
Sumber anggaran PHLN IFAD dan IsDB.  
Jumlah anggaran Rp.1.677.460.000,-.  
Realisasi anggaran Rp.1.133.205.000,- (67,55%).
- f) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan  
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan cukup memadai.
- g) Permasalahan dan Solusi  
Honorarium Fasdes dan OGO, serta bantuan transpor Fasdes baru dapat direalisasikan dari bulan Mei 2021 sehingga untuk meningkatkan serapan anggaran maka dilakukan perubahan uraian rekening pada beberapa komponen di bulan September 2021. Serapan anggaran tidak maksimal karena anggaran yang bersumber dari IsDB tidak dapat dialihkan ke komponen lainnya. Komponen yang tidak direalisasikan yaitu honor fasilitator desa (bulan Januari–April), honor OGO (bulan Januari-April), honor koordinator fasilitator desa (bulan Januari-Desember), bantuan transport koordinator fasilitator desa (bulan Januari-Desember), dan bantuan transport fasilitator desa (bulan Januari-Desember).



- b. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga
- 1) Program Pengendalian Penduduk
    - a) Dasar Hukum
 

DIPA Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2021
    - b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    - c) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan
 

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga
    - d) Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 

Kegiatan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan :

      - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Updating Data Keluarga;
      - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.

Hasil yang dicapai adalah :

      - Terlaksananya Kegiatan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga;
      - Terlaksananya kegiatan rapat pengendalian program KKBPK.
    - e) Sumber dan Jumlah Anggaran
 

Sumber anggaran APBN TP Provinsi Tahun 2021.

Jumlah anggaran Rp.25.700.000,-

Realisasi anggaran Rp.25.700.000,- (100%).
    - f) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
 

Kondisi sarana dan prasarana cukup memadai
    - g) Permasalahan dan Solusi
 

Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.
  - 2) Program Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Dasar Hukum
 

DIPA Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2021
    - b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    - c) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga

d) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- Pemetaan Kependudukan;
- Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

Hasil yang dicapai adalah :

- Tercapainya cakupan wilayah yang terpetakan dalam profil kependudukan dan KB;
- Tersusunnya Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- Cakupan Wilayah yang terpetakan dalam profil Kependudukan dan KB.

e) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran Dana Alokasi Umum.

Jumlah anggaran Rp.63.550.000,-

Realisasi anggaran Rp.63.550.000,- (100%).

f) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana cukup memadai

g) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Terkendalanya kegiatan dikarenakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
- Beberapa anggaran yang diajukan untuk kegiatan mengalami *refocusing* untuk penanganan Covid-19;
- Pemantauan kegiatan lapangan tidak maksimal.

Solusinya adalah :

- Melaksanakan kegiatan pertemuan melalui daring;
- Melakukan kegiatan yang masih bisa dilakukan sesuai protokol kesehatan di setiap wilayah;
- Pembatasan jumlah peserta untuk kegiatan pertemuan;
- Memaksimalkan input data secara *online*.





- 3) Program Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJS)
- a) Dasar Hukum  
DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia
  - b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  
Kementerian Sosial Republik Indonesia
  - c) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan  
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga
  - d) Pelaksanaan Program dan Kegiatan
    - Kartu Jawa Tengah Sejahtera yaitu kartu yang disediakan Pemerintah Daerah Jawa Tengah bekerjasama dengan PT. Bank Jawa Tengah untuk diberikan kepada fakir miskin tidak produktif penyandang disabilitas dan atau berpenyakit kronis serta belum mendapatkan Program Perlindungan Sosial dari Pemerintah Pusat kecuali Program Jaminan Sosial Kesehatan.
    - Kartu Jawa Tengah Sejahtera sebagai kartu identitas penerima bantuan jaminan sosial yang berfungsi sebagai sarana pengambilan bantuan jaminan sosial dalam bentuk Bantuan Uang Non Tunai sebesar Rp.250.000,- per bulannya yang diberikan setiap 3 bulan sekali atau tri wulan.
    - Dasar Hukum :
      - Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan pasal 34;
      - Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
      - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
      - Peraturan Pemerintah RI no. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
      - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
      - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
      - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
      - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera;
      - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial



Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Jumlah realisasi anggaran KJS untuk Kabupaten Purbalingga tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Anggaran Kartu Jawa Tengah Sejahtera Tahun 2021**

| No     | Tahap | Jumlah Penerima | Jumlah uang (Rp) | Keterangan   |
|--------|-------|-----------------|------------------|--|
| 1.     | I     | 177             | 132.750.000,-    | Jumlah penerima selalu berubah ubah disetiap tahapnya dikarenakan ada yang meninggal dunia dan tidak bisa langsung diganti pada saat itu juga. |
| 2.     | II    | 176             | 132.000.000,-    |  |
| 3.     | III   | 167             | 125.250.000,-    |  |
| 4.     | IV    | 216             | 162.000.000,-    |  |
| Jumlah |       |                 | 552.000.000,-    |  |

- Hasil yang dicapai adalah :  
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.
- e) Sumber dan Jumlah Anggaran  
Sumber anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.  
Jumlah anggaran Rp.552.000.000,-  
Realisasi anggaran Rp.552.000.000,- (100%).
- f) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan  
Kondisi sarana dan prasarana cukup memadai
- g) Permasalahan dan Solusi  
Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.
- 4) Program Keluarga Harapan (PKH)
  - a) Dasar Hukum  
DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia
  - b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  
Kementerian Sosial Republik Indonesia
  - c) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan  
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga
  - d) Pelaksanaan Program dan Kegiatan
    - Program Keluarga Harapan merupakan suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat



(KPM) yang memenuhi persyaratan terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM yaitu pendidikan dan kesehatan.

- Secara khusus PKH bertujuan :
  - Meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH;
  - Meningkatkan kualitas kesehatan peserta PKH;
  - Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH;
  - Mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial;
  - Memastikan terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial.
- Dasar Hukum ;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  - Keputusan Menteri Sosial RI N0.42/HUK/2007 tentang PKH dan KPM;
  - Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2009 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2009;
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 463/2/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PKH;
- Jumlah Anggaran dan KPM PKH Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Anggaran KPM PKH Tahun 2021**

| No. | Tahap/<br>Bulan | Jumlah<br>Keluarga<br>Penerima<br>Manfaat | Jumlah Bantuan<br>(Rp.) | Keterangan   |
|-----|-----------------|---|-------------------------|--|
| 1   | Tahap I         | 58.489                                    | 38.516.950.000,-        | Setiap tahap jumlah KPM berubah-ubah karena ada perubahan dari |
| 2   | Tahap II        | 60.506                                    | 40.333.825.000,-        |  |
| 3   | Tahap III       | 58.415                                    | 37.408.525.000,-        |  |



|        |          |        |                   |  |
|--------|----------|--------|-------------------|--|
| 4      | Tahap IV | 59.108 | 40.007.750.000,-  | miskin menjadi mampu atau graduasi.<br>Ada juga yang berpindah domisili dan sudah tidak ada komponennya.lagi |
| Jumlah |          |        | 156.267.050.000,- |  |

- e) Sumber dan Jumlah Anggaran  
Sumber anggaran APBN Tahun Anggaran 2021.  
Jumlah anggaran Rp.156.267.050.000,-  
Realisasi anggaran Rp.156.267.050.000,- (100%).
- f) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan  
Kondisi sarana dan prasarana cukup memadai
- g) Permasalahan dan Solusi  
Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.
- 5) Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- a) Dasar Hukum  
DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia
- b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  
Kementerian Sosial Republik Indonesia
- c) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan  
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga
- d) Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- Kelompok Usaha Bersama merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya aktivitas ekonomi keluarga masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Melalui kelompok ini mereka dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh anggota KUBE. Pembentukan KUBE didasari oleh kedekatan tempat tinggal. Jenis usaha atau ketrampilan anggota, ketersediaan sumber daya alam atau keadaan geografis. Latar belakang kehidupan budaya yang sama, memiliki motivasi yang sama.
  - Tujuan KUBE :
    - Meningkatkan dan memperkuat kesetiakawanan sosial warga miskin dan masyarakat dalam penanganan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial;
    - Meningkatkan pendapatan anggota KUBE;
    - Mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi anggota KUBE;
    - Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan utama fasilitas sosial publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial;



- Meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan fakir miskin;
- Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan masalah kemiskinan.
- Dasar Hukum :
  - UUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 34 Pasal 28 huruf f;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.
  - Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Jumlah Penerima Bantuan Sosial KUBE Tahun 2021 Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran Bantuan Sosial KUBE Tahun 2021**

| No     | Kecamatan   | Jumlah Kelompok | Jumlah Anggota | Jml Bantuan (Rp) |
|--------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1      | Bukateja    | 3               | 30             | 60.000.000,-     |
| 2      | Karanganyar | 3               | 30             | 60.000.000,-     |
| 3      | Karangjambu | 3               | 30             | 60.000.000,-     |
| 4      | Kutasari    | 4               | 40             | 80.000.000,-     |
| 5      | Kejobong    | 3               | 30             | 60.000.000,-     |
| Jumlah |             | 16              | 160            | 320.000.000,-    |

- Bantuan sosial KUBE tersebut di atas masih dalam proses untuk direalisasikan pada tahun 2022 dimana lokasinya dikhususkan di wilayah desa dan kecamatan yang pada tahun 2022 masuk kategori Wilayah Kemiskinan Ekstrem. Bantuan Sosial KUBE tersebut di atas merupakan bantuan dari Queensland Negara Bagian Australia yang sudah bekerjasama dengan Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- e) Sumber dan Jumlah Anggaran  
Sumber anggaran APBN Tahun Anggaran 2021.  
Jumlah anggaran Rp.320.000.000,-  
Realisasi anggaran Rp.320.000.000,- (100%).
- f) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan  
Kondisi sarana dan prasarana cukup memadai
- g) Permasalahan dan Solusi  
Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.



- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga
- 1) Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
    - a) Dasar Hukum  
Nomor : SP DIPA 018.11.3.039421/2021 tanggal 15 Februari 2021.
    - b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  
Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
    - c) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan  
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
    - d) Pelaksanaan Program dan Kegiatan
      - Penerima Manfaat Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebanyak 19 Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan anggaran Rp.775.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
        - Tahap penumbuhan sebanyak 14 Kelompok dengan alokasi bantuan Rp. 50.000.000,- per kelompok;
        - Tahap pengembangan sebanyak 5 Kelompok dengan alokasi bantuan Rp. 15.000.000,- per kelompok.

**Tabel 3.4**  
**P2L Tahap Penumbuhan Tahun 2021**

| No. | Kecamatan   | Desa/Kelurahan    | Nama Kelompok     |
|-----|-------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Bobotsari   | Karangtalun       | Subur Makmur      |
| 2   | Kertanegara | Adiarsa           | Srikandi          |
| 3   | Purbalingga | Purbalingga Kidul | Karya Tani        |
| 4   | Pengadegan  | Pasunggingan      | Delima            |
| 5   | Bobotsari   | Gunungkarang      | Puspa Mandiri     |
| 6   | Kaligondang | Penaruban         | Sri Kandi         |
| 7   | Pengadegan  | Larangan          | Mandiri Tama      |
| 8   | Mrebet      | Pagerandong       | Berkah Makmur     |
| 9   | Kalimanah   | Rabak             | Aglonema          |
| 10  | Kemangkong  | Majatengah        | Annisa            |
| 11  | Kutasari    | Karangaren        | Sri Lestari       |
| 12  | Kalimanah   | Klapasawit        | Mekar             |
| 13  | Karangjambu | Sanguwatang       | Mekar Sari        |
| 14  | Kertanegara | Karangasem        | Sri Langgeng Jaya |

**Tabel 3.5**  
**P2L Tahap Penumbuhan Tahun 2021**

| No. | Kecamatan | Desa /Kelurahan | Nama Kelompok |
|-----|-----------|-----------------|---------------|
| 1   | Mrebet    | Pengalusan      | Karya Tani    |
| 2   | Kejobong  | Langgar         | Barokah       |



|   |              |            |            |
|---|--------------|------------|------------|
| 3 | Pengadegan   | Pengadegan | Sri Rejeki |
| 4 | Bobotsari    | Talagening | Srikandi   |
| 5 | Karangmoncol | Karangsari | Mekar Sari |

- Masing-masing Kelompok Wanita Tani mempunyai anggota berkisar 20-30 rumah tangga yang saling berdekatan dalam satu kawasan yang rutin mengadakan pertemuan sebulan sekali. Di dalam pertemuan Kelompok Wanita Tani biasanya dibahas masalah bagaimana budidaya yang baik terutama benih apa yang akan ditanam di pekarangan, bagaimana pemberian air pada musim kemarau, masalah penggunaan pupuk organik, serta mengevaluasi apa yang telah dikerjakan setelah panen dari pekarangan rumah. Juga diadakan praktek berupa : pembibitan, penanaman dan pupuk organik. Setiap anggota wajib mengembangkan pemanfaatan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayur, buah, umbi) ataupun memelihara ternak dan ikan. Tujuannya adalah mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan/disumbangkan kepada anggota kelompok atau secara bersama-sama dijual oleh kelompok.
- Pendamping P2L mendampingi kelompok sasaran mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program P2KP secara keseluruhan. Proses pendampingan dimulai pada bulan Januari 2021 dengan sosialisasi program P2L kepada kelompok wanita tani. Selain itu, kelompok wanita tani juga diberikan pengetahuan mengenai penganekaragaman pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang, sehat, aman dan halal, serta bagaimana memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar rumah untuk membudidayakan umbi-umbian, sayur dan buah atau tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Serta pembuatan olahan makanan dengan menggunakan bahan pangan lokal dan memanfaatkan hasil dari pekarangan masing-masing anggota.
- Demplot
  - Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan rumah pangan lestari yang berfungsi sebagai lahan lokasi percontohan, tempat belajar dan praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan oleh kelompok. Lahan demplot P2L kelompok wanita tani menggunakan tanah milik anggota kelompok. Contoh tanaman yang ada di lokasi demplot meliputi tanaman umbi-umbian (singkong, ganyong, talas, ubi jalar),



tanaman sayuran (terong, bayam, buncis, kacang panjang, kacang tanah, mentimun, tomat, cabe merah, cabe rawit, pare, caisim, oyong, bayam merah, kembang kol, kangkung, seledri, bawang daun, katuk), TOGA (kunyit, jahe, kencur, serai, lengkuas), tanaman buah (pisang, Jambu kristal, kelengkeng, papaya, belimbing, sirsak), budidaya ternak (ayam) dan budidaya ikan (lele).

- Kebun Bibit Desa
  - Kebun Bibit adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok. Kegiatan pembibitan dimaksudkan untuk penyulaman atau penanaman kembali demplot kelompok maupun pekarangan milik anggota dan masyarakat desa. Kebun bibit menggunakan lahan milik pereorangan karena nantinya kebun bibit akan diserahkan dan dikelola pihak desa. Kebun Bibit Desa dari awal kegiatan sudah berjalan dengan selalu mengisi kebun bibit tersebut dan bersama-sama merawat dan memberdayakan fungsi kebun bibit tersebut. Sudah banyak bibit baik yang dibagikan ke anggota maupun yang dijual. Adapun isi kebun bibit antara lain bibit : terong, cabe merah, cabe rawit, tomat, bayam merah, dan lain lain.
- Pekarangan Anggota
  - Kegiatan di pekarangan anggota yaitu lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan. Pekarangan anggota sampai saat ini masih ada tanamannya yang menghasilkan umbi, buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, yang berfungsi sebagai buah, sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Pekarangan anggota sudah diusahakan secara optimal dan banyak anggota yang sudah merasakan manfaat dari kegiatan ini. Dengan metode ini diharapkan anggota kelompok wanita tani dapat belajar sambil mengerjakan, dapat menemukan dan memecahkan masalahnya sendiri.
- Peluang
  - Kemandirian pangan rumah tangga pada suatu kawasan;
  - Diversifikasi pangan yang berbasis sumber daya lokal;
  - Konservasi tanaman-tanaman pangan maupun pakan termasuk perkebunan, hortikultura untuk masa yang akan datang;





- Kesejahteraan petani dan masyarakat yang memanfaatkan Kawasan Rumah Pangan Lestari;
  - Pemanfaatan kebun bibit desa agar menjamin kebutuhan masyarakat akan bibit terpenuhi, baik bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, termasuk ternak, unggas, ikan dan lainnya.
  - Manfaat
    - Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari;
    - Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos;
    - Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan;
    - Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri.
- e) Sumber dan Jumlah Anggaran  
 Sumber anggaran APBN TP Provinsi Tahun 2021.  
 Jumlah anggaran Rp.775.000.000,-  
 Realisasi anggaran Rp.775.000.000,- (100%).
- f) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan  
 Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan cukup memadai.
- g) Permasalahan dan Solusi  
 Permasalahan yang dihadapi adalah :
- Luas pekarangan anggota kelompok bervariasi sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pembagian bibit;
  - Belum semua anggota kelompok mengetahui cara tanam, waktu tanam dan pola tanam yang baik;
  - Belum semua anggota kelompok menanam tanaman umbi-umbian, tanaman sayur dan buah di lahan pekarangannya;
  - Desain pekarangan masing-masing anggota kelompok belum teratur;
  - Kurangnya pengetahuan anggota kelompok dalam mengolah hasil pekarangan;
  - Musim kemarau menyebabkan tanaman layu kekurangan air dan banyaknya gulma yang tumbuh di lahan pekarangan;
  - Anggota kelompok sebagian bekerja di pabrik sehingga tingkat partisipasi dalam pemanfaatan pekarangan belum maksimal.



- Diperlukan dukungan dari kelompok tani dan aparat kelurahan untuk memotivasi dan menggerakkan kegiatan kelompok.

Solusinya adalah :

- Pemberian motivasi guna meningkatkan kesadaran anggota kelompok untuk memanfaatkan pekarangan dengan tanaman yang bermanfaat, seperti tanaman umbi-umbian, sayur dan buah;
- Memberikan contoh pemanfaatan lahan pekarangan melalui demplot;
- Sosialisasi mengenai pembuatan desain pekarangan yang baik;
- Pembagian bibit dilakukan secara proporsional sesuai dengan luas pekarangan anggota kelompok;
- Bimbingan teknis budidaya tanaman yang baik mulai dari persemaian, cara tanam, waktu tanam, pola tanam yang baik sampai dengan panen dan pasca panen;
- Praktek pengolahan hasil pekarangan, seperti pembuatan kripik pisang, kripik singkong, jenang tape;
- Penyiraman secara teratur tiap pagi dan sore hari, serta penyiangan rumput di pekarangan dilakukan untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh musim kemarau;
- Penguatan kerjasama antar anggota kelompok melalui kegiatan kerja bakti dengan kelompok tani, dan aparat Desa/Kelurahan.



### **3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN**

#### **3.1.1. Target Kinerja**

##### **a. Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga**

###### **1) Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan**

Target kinerja :

- Bantuan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas tanaman pangan.

###### **2) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura**

Target kinerja :

- Pengembangan kawasan hortikultura.

###### **3) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian**

Target kinerja :

- Penyediaan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang berkualitas.

###### **4) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (UPLAND)**

Target kinerja :

- Fasilitasi pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (UPLAND).

##### **b. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga**

###### **1) Program Pengendalian Penduduk**

Target kinerja :

- Pelaksanaan Sarasehan Hasil Updating Data Keluarga;
- Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.

###### **2) Program Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

Target kinerja :

- Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- Pemetaan Kependudukan;
- Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

###### **3) Program Keluarga Harapan (PKH)**

Target kinerja :



- Memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi persyaratan terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM yaitu pendidikan dan kesehatan.
- 4) Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- Target kinerja :
- Meningkatkan kesejahteraan keluarga masyarakat miskin melalui aktivitas ekonomi dan pemberdayaan sosial.
- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga
- 1) Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
- Target kinerja :
- Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri.

### **3.1.2. Realisasi**

- a. Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga
- 1) Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
- Realisasi :
- Tersedianya bantuan sarana berupa :
    - Pengembangan kawasan padi in hibrida seluas 2.703 ha;
    - Pengembangan kawasan jagung seluas 680 ha;
    - Pengembangan kawasan jagung tumpangsari seluas 113 ha;
    - Perbenihan kedelai varietas detam seluas 25 ha;
    - Pengembangan kawasan kedelai seluas 386 ha;
    - Pengembangan kawasan kacang hijau seluas 100 ha.
  - Tersedianya bantuan prasarana berupa :
    - Pembangunan UPH Jagung;
    - Pembangunan UPH Kedelai;
    - Pembangunan UPPO.
- 2) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
- Realisasi :
- Pengembangan kawasan jamur seluas 100 m<sup>2</sup>;
  - Pengembangan kawasan durian seluas 30 ha;
  - Pengembangan kawasan tanaman obat (kapulaga) seluas 5 ha.
- 3) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian
- Realisasi :
- Pembangunan 2 (dua) embung pertanian;
  - Rehabilitasi jaringan irigasi tersier sejumlah 22 paket;



- Pemberian bantuan *power thresher* 5 unit, *corn sheller* 5 unit;
  - Fasilitasi pupuk dan pestisida 1 paket;
  - Fasilitasi pembiayaan pertanian 1 paket.
- 4) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (UPLAND)
- Realisasi :
- Fasilitasi kegiatan integrasi kambing dan lada yang berlokasi di 9 desa di Kecamatan Pengadegan dan 11 desa di Kecamatan Kejobong.
- b. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga
- 1) Program Pengendalian Penduduk
- Realisasi :
- Terlaksananya Kegiatan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga;
  - Terlaksananya kegiatan rapat pengendalian program KKBPK.
- 2) Program Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Realisasi :
- Tercapainya cakupan wilayah yang terpetakan dalam profil kependudukan dan KB;
  - Tersusunnya Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
  - Cakupan Wilayah yang terpetakan dalam profil Kependudukan dan KB.
- 3) Program Keluarga Harapan (PKH)
- Realisasi :
- Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
- 4) Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- Realisasi :
- Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan masalah kemiskinan.
- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga
- 1) Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
- Realisasi :
- Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan guna mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga.



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat**

| No | Kementerian/<br>Lembaga                           | Dasar<br>Pelaksanaan<br>Penugasan<br>(Tugas<br>Pembantuan)   | Program,<br>Kegiatan.<br>Output dan<br>Rincian<br>Kegiatan                                 | Lokasi  | OPD Pelaksana<br>Tugas<br>Pembantuan        | Alokasi Anggaran   | Realisasi Anggaran | %      | Realisasi Capaian  | %    | Keterangan                                  |
|----|---|--|--|---|---|--------------------|--------------------|--------|--|------|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                  | 8                  | 9      | 10   | 11   | 12  |
| 1. | Kementerian<br>Pertanian<br>Republik<br>Indonesia | SP DIPA-<br>018.04.4.03915<br>tanggal<br>23 November<br>2021 | Program<br>Peningkatan<br>Produksi<br>Produktivitas<br>dan Mutu Hasil<br>Tanaman<br>Pangan | Kecamatan<br>Kaligondang,<br>Padamara,<br>Kutasari,<br>Bojongsari,<br>Bobotsari,<br>Karangreja,<br>Kertanegara,<br>Karangmoncol<br>, Kemangkon,<br>Pengadegan,<br>Kalimanah,<br>Karanganyar,<br>Rembang,<br>Mrebet,<br>Kejobong | Dinas Pertanian<br>Kabupaten<br>Purbalingga | Rp.3.403.830.000,- | Rp.3.319.615.025,- | 97,53% | Tersedianya<br>bantuan sarana<br>berupa :<br>- Pengembangan<br>kawasan padi<br>inhibrida seluas<br>2.703 ha;<br>- Pengembangan<br>kawasan jagung<br>seluas 680 ha;<br>- Pengembangan<br>kawasan jagung<br>tumpangsari<br>seluas 113 ha;<br>- Perbenihan<br>kedelai varietas<br>detam seluas 25<br>ha;<br>- Pengembangan<br>kawasan kedelai<br>seluas 386 ha;<br>- Pengembangan<br>kawasan kacang | 100% | Permasalahan<br>yang dihadapi<br>tidak ada. |



|    |  |  |  |  |                                       |                    |                    |        |   |      |   |
|----|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|---|------|---|
|    |  |  |  |  |                                       |                    |                    |        | hijau seluas 100 ha.<br>Tersedianya bantuan prasarana berupa :<br>- Pembangunan UPH Jagung;<br>- Pembangunan UPH Kedelai;<br>- Pembangunan UPPO.  |      |   |
| 2. | Kementerian Pertanian Republik Indonesia | SP DIPA-018.03.4.03915 1/2021 tanggal 23 November 2021 | Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura | Desa Gondang Kec. Karangreja, Desa Panunggalan Kec. Pengadegan, Desa Pasunggan Kec. Pengadegan, Desa Slinga Kec. Kaligondang | Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga | Rp.330.875.000,-   | Rp.313.375.000,-   | 94,71% | - Pengembangan kawasan jamur seluas 100 m2;<br>- Pengembangan kawasan durian seluas 30 ha;<br>- Pengembangan kawasan obat (kapulaga) seluas 5 ha. | 100% | Permasalahan yang dihadapi adalah :<br>- Seperti pada jenis sayuran lainnya (cabai, sawi, tomat, kobis, dan lain-lain);<br>- Adanya pandemi Covid-19, berakibat penjualan jamur tersendat, dan daya beli masyarakat menurun sehingga pendapatan petani menurun. |
| 3. | Kementerian Pertanian Republik Indonesia | SP-DIPA 018.03.4.03915 1/2021 Tanggal 5 Desember       | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi                   | Desa Karang Sari Kec. Karangmoncol   | Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga | Rp.2.134.693.000,- | Rp.2.134.413.000,- | 99,99% | - Pembangunan 2 (dua) embung pertanian;<br>- Rehabilitasi   | 100% | Permasalahan yang dihadapi tidak ada.   |



|  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 2019 | Pangan Berkualitas Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian | , Desa Bakulan Kec. Kemangkon, Desa Adiarsa Kec. Kertanegara, Desa Krangean Kec. Kertanegara, Desa Banjarkerta Kec. Karanganyar, Desa Maribaya Kec. Karanganyar, Desa Wanogara Wetan Kec. Rembang, Desa Makam Kec. Rembang, Desa Karangjambu Kec. Karangjambu, Desa Sirandu Kec. Karangjambu, Desa Danasari Kec. Karangjambu, Desa Tlahab Lor Kec. |  |  |  | <p> jaringan irigasi tersier sejumlah 22 paket;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian bantuan <i>power thresher</i> 5 unit, <i>corn sheller</i> 5 unit;</li> <li>- Fasilitas pupuk dan pestisida 1 paket;</li> <li>- Fasilitas pembiayaan pertanian 1 paket.</li> </ul> |  |  |
|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|





|    |                                      |   |                                       |  |   |                    |                    |        |   |      |   |
|----|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------|---|------|---|
|    |                                      |   |                                       | Karangreja,<br>Desa Tlahab<br>Kidul Kec.<br>Karangreja,<br>Desa<br>Karangtalun<br>Kec.<br>Bobotsari,<br>Desa<br>Banjaran Kec.<br>Bojongsari,<br>Desa<br>Karangaren<br>Kec. Kutasari,<br>Desa Kutasari<br>Kec. Kutasari,<br>Desa Prigi<br>Kec.<br>Padamara,<br>Desa<br>Sokawera<br>Kec.<br>Padamara,<br>Desa Penolih<br>Kec.<br>Kaligondang,<br>Desa<br>Kaligondang<br>Kec.<br>Kaligondang<br>dan Desa<br>Kalikajar Kec.<br>Kaligondang |   |                    |                    |        |   |      |   |
| 4. | Kementerian<br>Pertanian<br>Republik | DIPA-<br>018.08.4.03916<br>0/2021 Tanggal | Program<br>Ketersediaan,<br>Akses dan | Kec.<br>Pengadegan,<br>Kec.  | Dinas Pertanian<br>Kabupaten<br>Purbalingga | Rp.1.677.460.000,- | Rp.1.133.205.000,- | 67,55% | Fasilitasi kegiatan<br>integrasi kambing<br>dan lada yang | 100% | Permasalahan<br>yang dihadapi<br>adalah : |



|  |           |                  |  |          |  |  |  |  |  |   |
|--|-----------|------------------|--|----------|--|--|--|--|--|---|
|  | Indonesia | 23 November 2020 | Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (UPLAND) | Kejobong |  |  |  |  | berlokasi di 9 desa di Kecamatan Pengadegan dan 11 desa di Kecamatan Kejobong. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium Fasdes dan OGO, serta bantuan transpor Fasdes baru dapat direalisasikan dari bulan Mei 2021 sehingga untuk meningkatkan serapan anggaran maka dilakukan perubahan uraian rekening pada beberapa komponen di bulan September 2021;</li> <li>- Serapan anggaran tidak maksimal karena anggaran yang bersumber dari IsDB tidak dapat dialihkan ke komponen lainnya;</li> <li>- Komponen yang tidak direalisasikan yaitu honor</li> </ul> |
|--|-----------|------------------|--|----------|--|--|--|--|--|---|



|   |  |   |  |                       |   |                 |                 |      |  |      |   |
|---|--|---|--|-----------------------|---|-----------------|-----------------|------|--|------|---|
|   |  |   |  |                       |   |                 |                 |      |  |      | fasilitator desa (bulan Januari-April), honor OGO (bulan Januari-April), honor koordinator fasilitator desa (bulan Januari-Desember), bantuan transport koordinator fasilitator desa (bulan Januari-Desember), dan bantuan transport fasilitator desa (bulan Januari-Desember). |
| 5 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | DIPA Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2021 | Program Pengendalian Penduduk Kegiatan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka | Kabupaten Purbalingga | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga | Rp.25.700.000,- | Rp.25.700.000,- | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Kegiatan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga;</li> <li>- Terlaksanya kegiatan rapat pengendalian program KKBPK.</li> </ul> | 100% | Permasalahan yang dihadapi tidak ada.   |



|   |  |   |  |                       |   |                 |                 |      |   |      |   |
|---|--|---|--|-----------------------|---|-----------------|-----------------|------|---|------|---|
|   |  |   | Pengendalian Kuantitas Penduduk  |                       |   |                 |                 |      |   |      |   |
| 6 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | DIPA Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2021 | Program Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Purbalingga | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga | Rp.63.550.000,- | Rp.63.550.000,- | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercapainya cakupan wilayah yang terpetakan dalam profil kependudukan dan KB;</li> <li>- Tersusunnya Profil Kependudukan Kelurga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);</li> <li>- Cakupan Wilayah yang terpetakan dalam profil Kependudukan dan KB.</li> </ul> | 100% | <p>Permasalahan yang dihadapi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkendalanya kegiatan dikarenakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</li> <li>- Beberapa anggaran yang diajukan untuk kegiatan mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19;</li> <li>- Pemantauan kegiatan lapangan tidak maksimal.</li> </ul> <p>Solusinya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan kegiatan pertemuan melalui daring;</li> <li>- Melakukan kegiatan yang masih bisa dilakukan</li> </ul> |



|   |  |  |   |                                  |   |                      |                      |      |   |      |  |
|---|--|--|---|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|------|---|------|--|
|   |  |  |   |                                  |   |                      |                      |      |   |      | sesuai protokol kesehatan di setiap wilayah;<br>- Pembatasan jumlah peserta untuk kegiatan pertemuan;<br>- Maksimalkan input data secara <i>online</i> . |
| 7 | Kementerian Sosial Republik Indonesia    | DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia | Program Keluarga Harapan (PKH)          | Kabupaten Purbalingga            | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga | Rp.156.267.050.000,- | Rp.156.267.050.000,- | 100% | Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.                           | 100% | Permasalahan yang dihadapi tidak ada.  |
| 8 | Kementerian Sosial Republik Indonesia    | DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia | Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)   | Kabupaten Purbalingga            | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga | Rp.320.000.000,-     | Rp.320.000.000,-     | 100% | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan masalah kemiskinan. | 100% | Permasalahan yang dihadapi tidak ada.  |
| 9 | Kementerian Pertanian Republik Indonesia | SP DIPA 018.11.3.03942 tanggal 15 Februari | Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) | Desa Karangtalun Kec. Bobotsari, | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  | Rp.775.000.000,-     | Rp.775.000.000,-     | 100% | Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat dalam                          | 100% | Permasalahan yang dihadapi adalah :<br>- Luas  |



|  |  |      |  |   |                       |  |  |   |  |
|--|--|------|--|---|-----------------------|--|--|---|--|
|  |  | 2021 |  | Desa Adiarsa<br>Kec. Kertanegara,<br>Kel. Purbalingga<br>Kidul Kec. Purbalingga,<br>Desa Pasunggingan<br>Kec. Pengadegan,<br>Desa Gunungkaran<br>g Kec. Bobotsari,<br>Desa Pendaruban<br>Kec. Kaligondang,<br>Desa Larangan<br>Kec. Pengadegan,<br>Desa Pagerandong<br>Kec. Mrebet,<br>Desa Rabak<br>Kec. Kalimanah,<br>Desa Majatengah<br>Kec. Kemangkon,<br>Desa Karangaren<br>Kec. Kutasari, | Kabupaten Purbalingga |  |  | pemanfaatan lahan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan guna mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. | pekarangan anggota kelompok bervariasi sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pembagian bibit;<br>- Belum semua anggota kelompok mengetahui cara tanam, waktu tanam dan pola tanam yang baik;<br>- Belum semua anggota kelompok mananam tanaman umbi-umbian, tanaman sayur dan buah di lahan pekarangannya<br>- Desain pekarangan masing-masing anggota kelompok belum teratur;<br>- Kurangnya |
|--|--|------|--|---|-----------------------|--|--|---|--|



|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Desa Klapasawit<br>Kec. Kalimanah,<br>Desa Sanguwatang<br>Kec. Karangjambu,<br>Desa Karangasem<br>Kec. Kertanegara,<br>Desa Pengalusan<br>Kec. Mrebet,<br>Desa Langgar<br>Kec. Kejobong,<br>Desa Pengadegan<br>Kec. Pengadegan,<br>Desa Talagening<br>Kec. Bobotsari,<br>Desa Karangsari<br>Kec. Karangmoncol |  |  |  |  |  | pengetahuan anggota kelompok dalam mengolah hasil pekarangan;<br>- Musim kemarau menyebabkan tanaman layu kekurangan air dan banyaknya gulma yang tumbuh di lahan pekarangan;<br>- Anggota kelompok sebagian bekerja di pabrik sehingga tingkat partisipasi dalam pemanfaatan pekarangan belum maksimal.<br>- Diperlukan dukungan dari kelompok tani dan aparat kelurahan untuk memotivasi dan menggerakkan kegiatan |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>kelompok.<br/>Solusinya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian motivasi guna meningkatkan kesadaran anggota kelompok untuk memanfaatkan pekarangan dengan tanaman yang bermanfaat, seperti tanaman umbi-umbian, sayur dan buah;</li> <li>- Memberikan contoh pemanfaatan lahan pekarangan melalui demplot;</li> <li>- Sosialisasi mengenai pembuatan desain pekarangan yang baik;</li> <li>- Pembagian bibit dilakukan secara proporsional sesuai dengan luas</li> </ul> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>pekarangan anggota kelompok;</li> <li>- Bimbingan teknis budidaya tanaman yang baik mulai dari persemaian, cara tanam, waktu tanam, pola tanam yang baik sampai dengan panen dan pasca panen;</li> <li>- Praktek pengolahan hasil pekarangan, seperti pembuatan kripik pisang, kripik singkong, jenang tape;</li> <li>- Penyiraman secara teratur tiap pagi dan sore hari, serta penyiangan rumput di pekarangan dilakukan untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh musim</li> </ul> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|





## **3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN KABUPATEN**

### **3.2.1. Target Kinerja**

a. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga

1) Program Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJS)

Target kinerja :

- Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

### **3.2.2. Realisasi**

a. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga

1) Program Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJS)

Realisasi :

- Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat miskin tidak produktif penyandang disabilitas dan atau berpenyakit kronis serta belum mendapatkan Program Perlindungan Sosial dari Pemerintah Pusat kecuali Program Jaminan Sosial Kesehatan.



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi**

| No | Bidang Urusan | Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tugas Pembantuan) | Program, Kegiatan. Output dan Rincian Kegiatan | Lokasi                | OPD Pelaksana Tugas Pembantuan  | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | %    | Realisasi Capaian  | %    | Keterangan                            |
|----|---------------|--|--|-----------------------|---|------------------|--------------------|------|--|------|---------------------------------------|
| 1  | 2             | 3  | 4  | 5                     | 6   | 7                | 8                  | 9    | 10   | 11   | 12                                    |
| 1. | Urusan Sosial | DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia     | Program Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJS)      | Kabupaten Purbalingga | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga | Rp.552.000.000,  | Rp.552.000.000,-   | 100% | Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat miskin tidak produktif penyandang disabilitas dan atau berpenyakit kronis serta belum mendapatkan Program Perlindungan Sosial dari Pemerintah Pusat kecuali Program Jaminan Sosial Kesehatan. | 100% | Permasalahan yang dihadapi tidak ada. |



### **3.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA**

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan antara lain sebagai berikut :

1. DIPA Tugas Pembantuan terkadang dikeluarkan tidak tepat waktu, sehingga adanya keterlambatan dalam memulai pelaksanaan Tugas Pembantuan;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program Tugas Pembantuan yang akan dilaksanakan;
3. Kurangnya koordinasi antara OPD teknis penerima Tugas Pembantuan dan OPD lainnya yang terkait.

### **3.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT**

Saran dan tindak lanjut langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan antara lain sebagai berikut :

1. Pencairan dana Tugas Pembantuan harus tepat waktu;
2. OPD harus melakukan monitoring secara terus menerus kepada masyarakat penerima program Tugas Pembantuan;
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi Tugas Pembantuan;
4. Meningkatkan koordinasi diantara OPD pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan dan OPD sebagai penyedia data sehingga pelaporan dapat dilakukan sesuai batas waktu yang disediakan.

